

PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA (PKK) BIDANG APLIKASI PERKANTORAN DI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) INFORMATIKA SARANA CIPTA SIDOARJO

Muhammad Ridwan Shahputra¹, Heru Siswanto²

¹²Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya

E-mail: muhammadridwan.18083@mhs.unesa.ac.id

Received 2022;
Revised 2022;
Accepted 2022;
Published Online 2022;

Abstrak: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) didirikan dengan tujuan untuk memberikan keterampilan dan keahlian kepada masyarakat yang kurang mampu dan masih menggangu agar mudah memasuki dunia kerja. Oleh karena itu perlu adanya program untuk memberikan kursus dan pelatihan bagi masyarakat antara lain program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK). Yang dimaksud dengan Program PKK adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi kepada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi dibidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan calon peserta didik, implementasi dan dampak dari program PKK. Sedangkan metode dalam mengumpulkan data dari penelitian ini adalah wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah tercapainya pengelolaan program PKK dengan indikator terpenuhinya syarat - syarat menjadi calon peserta didik program PKK di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Informatika Sarana Cipta (ISC) Sidoarjo, terlaksananya implementasi program PKK bidang Aplikasi Perkantoran, dan adanya dampak positif dari program PKK dimana alumni program PKK ini diharapkan dalam waktu satu tahun bekerja di DUDI, minimal 50% alumni sudah bekerja di DUDI.

Kata Kunci: Bantuan Pemerintah, Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Bidang Aplikasi Perkantoran

Abstract: The Institute for Courses and Training (LKP) was established with the aim of providing skills and expertise to underprivileged and unemployed people so that they can easily enter the world of work. Therefore, it is necessary to have a program to provide courses and training for the community, including the Job Skills Education (PKK) program. What is meant by the PKK Program is an education and training service program that is oriented to the development of work skills that are in accordance with industrial needs, given to students so that they have competence in certain skills as evidenced by a certificate of competence working in the Business World and the Industrial World (DUDI). The focus of this research is to determine the requirements of prospective students, implementation and impact of the PKK program. While the methods of collecting data from this research are in-depth interviews, observation and documentation. The result of this research is the achievement of PKK program management with indicators of meeting the requirements - requirements to become prospective students of the PKK program at the Informatics Sarana Cipta (ISC) Course and Training Institute (ISC) Sidoarjo, the implementation of the PKK program in the Office Application field, and the positive impact of the PKK program where alumni of the PKK program are expected within one year of working in DUDI, at least 50% of alumni are already working at DUDI.

Keywords: Government assistance, Work Skills Education Program (PKK) and Office Application Areas

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:
Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Gedung O-1 Lantai 2 Jalan Lidah Wetan
Sby Kode Pos 60213
Telp. 031-7532160 Fax. 031-7532112
E-mail: jpus@unesa.ac.id

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Pendidikan menurut Hamalik (2009) merupakan suatu bentuk usaha sadar untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang memberikan dampak kemajuan untuk dirinya sehingga terjadi perubahan menuju arah yang lebih baik. Sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.

Menurut Mustofa Kamil (2009) Pendidikan Non Formal adalah sebuah upaya yang sistematis, terstruktur serta berkelanjutan melalui hubungan sosial dengan tujuan membantu masyarakat baik individu maupun kelompok dalam meningkatkan potensi diri dan taraf hidup sehingga tercipta kesejahteraan sosial. Selain itu Pendidikan Non Formal juga merupakan bentuk pendidikan yang diimplementasikan untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan sebagai pelengkap, penambah, maupun pengganti dari pendidikan formal yang telah ditempuh. Wijayanti (2017: 49) mengatakan bahwa pendidikan luar sekolah tidak hanya mengajak peserta didik untuk memindahkan atau mentransfer pengetahuan dalam pembelajaran saja namun juga melakukan beberapa aktivitas yang berorientasi pada terwujudnya perubahan perilaku dengan tahap-tahap penyadaran, perhatian, tanggung jawab, dan lain sebagainya.

Selain itu Pendidikan Non Formal juga berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik yang memberikan penekanan pengetahuan serta keterampilan fungsional. Salah satu bentuk satuan dari Pendidikan Non Formal ialah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: “Kursus dan pelatihan diselenggarakan untuk warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan lebih dalam mengenai suatu hal, kecakapan hidup yang berguna untuk kehidupan, keterampilan, serta sikap yang dapat dimanfaatkan sebagai mengembangkan diri, mengembangkan profesi, keperluan pekerjaan, usaha mandiri serta untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan hasil dari pelaksanaan kursus dan pelatihan tersebut setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melewati proses penilaian dan penyetaraan yang dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk Pemerintah ataupun Pemerintahan Daerah yang mengacu pada standar nasional pendidikan.”

Menurut Triyana (2012) lembaga kursus sebagai lembaga Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diupayakan, didanai, serta diselenggarakan oleh warga masyarakat untuk warga masyarakat itu sendiri dengan tujuan untuk memperoleh skill, pengetahuan, serta kecakapan hidup untuk memperbaiki diri, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, maupun masuk di dunia pekerjaan. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai salah satu Pendidikan Non Formal harus dikelola dengan sungguh – sungguh agar mampu menghasilkan output berkualitas dan memiliki kompetensi, terlebih apabila kita memahami bahwa latar belakang peserta didik dari Pendidikan Non Formal adalah sebagian besar mereka yang memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke bawah, mereka tidak berkesempatan melanjutkan ke Pendidikan Formal dan lebih tinggi dikarenakan faktor ekonomi dan beberapa faktor lainnya. Diantaranya mereka memiliki tingkat ekonomi yang kurang beruntung, putus sekolah dan pengangguran. Tentu sangat ironis bila lembaga kursus dan pelatihan dikelola secara tidak berkualitas, dan tentunya banyak juga dari lembaga kursus yang sudah dikelola dengan baik dan profesional, tetapi tidak ada salahnya bila di dalam pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan tetap berusaha secara terus menerus untuk berupaya memikirkan hal yang positif dan yang lebih baik serta menyikapinya agar menuju yang lebih baik.

Menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi, tantangan utama ke depan adalah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif. Hal ini sejalan dengan pendapat Herlinda

(2017:2) saat ini era globalisasi di Indonesia sedang memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disebut dengan MEA yang artinya kondisi seperti ini terjadi persaingan ketat dan sulit dalam dunia kerja. Peningkatan tersebut berlaku untuk semua sektor, baik sektor industri maupun sektor jasa dengan mengandalkan sumber daya manusia. Diperlukan suatu acuan baku untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sebagai tenaga kerja profesional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha maupun dunia industri. Agar dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi program pendidikan dan pelatihan kerja nasional, diperlukan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Anwar (2012) menyatakan bahwasannya terdapat empat pilar pembelajaran di era globalisasi saat ini yaitu pengetahuan, keterampilan, kemandirian serta kemampuan untuk beradaptasi dan team work.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,31 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,26 persen, turun 0,81 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020

Melihat dari kenyataan yang ada, mengapa masih terjadi pengangguran? Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang merasakan sulitnya dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan harapannya, hal tersebut dikarenakan oleh banyak faktor, salah satu penyebabnya ialah kemampuan dan kecakapan kerja yang dimiliki oleh setiap individu masih belum maksimal. Maka dari itu, masyarakat perlu diberi pendidikan mengenai keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan secara berkelanjutan yaitu melalui program program yang dikembangkan oleh Pendidikan Non Formal. Menurut Mulyadi (2018: 106) penyerapan tenaga kerja yang masih tergolong rendah terhadap angkatan kerja dapat dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, lambatnya pergerakan ekonomi suatu negara, serta angkatan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada.

Banyak orang tahu apa yang harus lakukan, akan tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak mau melakukan dan mewujudkannya. Pada dasarnya pemberian pendidikan pelatihan dan keterampilan dimaksudkan agar lulusan kursus mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui keterampilan yang dimilikinya. Sehingga dengan pengetahuan dan keterampilan yang didapatnya tersebut, peserta didik akan dapat melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang utuh, yang mandiri. Mampu menghasilkan sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang harus memberdayakan apa yang ada di sekitarnya untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Salah satu keterampilan yang sangat bermanfaat baik untuk dunia pekerjaan maupun usaha mandiri yakni aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran berguna untuk mendukung pekerjaan sehari-hari seperti, membuat suatu dokumen, membuat power point untuk presentasi, melakukan analisis suatu data maupun melakukan perhitungan angka-angka.

Dari informasi yang ada terkait dengan pengangguran yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yang paling tertinggi di Provinsi Jawa Timur, Lembaga Kursus dan Pelatihan Informatika Sarana Cipta yang berada di Kabupaten Sidoarjo, bergerak untuk membantu masyarakat yang belum bekerja atau pengangguran, agar memiliki keterampilan dan keahlian di bidang komputer, memiliki sertifikasi komputer yang selanjutnya mudah untuk mencari dan mendapatkan kerja di dunia usaha dan dunia industri. Contoh aplikasi perkantoran yang paling terkenal dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, dan lain sebagainya.

Selama ini Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Informatika Sarana Cipta, memiliki peserta didik yang terdiri dari: peserta didik reguler, peserta didik privat, in house training dan peserta didik bantuan dari Pemerintah. Dikutip dari Fauzi, Erwin (2018: 31) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ialah bagian dari Pendidikan Non Formal yang secara aktif berkontribusi dan memberikan layanan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap untuk masyarakat hal ini didukung dengan tercapainya jumlah LKP hampir 20.152 ribu pada tahun 2017. Terkait dengan program Pemerintah yaitu dari

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Vokasi, Kemendikbud Republik Indonesia, antara lain adalah program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yaitu program yang berorientasi untuk memberikan layanan pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini diperuntukkan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di Dunia Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja lainnya (Juknis PKK, Dirbinsuslat, Dirjen Vokasi, Kemendikbud RI tahun 2021).

Fokus dalam penelitian ini ialah memberikan pendidikan dan keterampilan di bidang kursus komputer program Aplikasi Perkantoran, yaitu program Microsoft Word, Excel dan Power point kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan yaitu lulusan SMA sederajat, berusia 18 – 25 tahun dan belum bekerja atau masih menganggur. Adapun tujuan dari program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah mendidik dan melatih peserta didik dengan keterampilan vokasi yang selaras dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja lainnya, selanjutnya memastikan peserta didik PKK mengikuti uji kompetensi, dan peserta didik terserap dan bekerjadi Dunia Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja lainnya dalam jangka waktu selama satu tahun.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Bantuan Pemerintah untuk program Pendidikan Kecakapan Kerja di LKP Informatika Sarana Cipta (ISC) yang dituangkan dalam judul "Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Bidang Kursus Aplikasi Perkantoran di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Informatika Sarana Cipta Sidoarjo"

Metode

Penelitian yang berjudul Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Bidang Aplikasi Kantoran di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Informatika Sarana Cipta Sidoarjo ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan agar memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi mengenai program kecakapan kerja bidang aplikasi perkantoran di LKP Informatika Sarana Cipta secara detail, menyeluruh serta dapat mendeskripsikan hasil temuan lapangan terkait tujuan yang ingin didapat oleh peneliti.

Menurut Riyanto (2007) penelitian kualitatif ialah penelitian yang berbentuk deskripsi umum dan dilakukan pada kondisi alamiah. Penelitian ini juga dilakukan dengan mendapatkan dan menganalisis data hingga peneliti mencapai pada titik jenuh. Adapun tahapan penelitian kualitatif menurut Raco (2010: 18) diawali dengan menentukan topik terlebih dahulu. Biasanya masih bersifat umum lalu topik tersebut dikembangkan dan mengerucut menjadi lebih spesifik lagi. Selanjutnya dihubungkan dengan literature ataupun buku - buku bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Afrita (2018:314) juga berpendapat cara untuk mengadakan studi pendahuluan yakni dengan mencari data pendukung dari berbagai sumber pustaka, melakukan tanya jawab kepada sumber informasi dan datang langsung ke lokasi tempat diadakan penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Informatika Sarana Cipta yang beralamatkan di Perumahan Jenggolo Utara No. C-2, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Waktu penelitian dilaksanakan selama empat bulan dimulai dari tanggal 6 September 2021 – 27 Desember 2021.

Pada penelitian ini yang menjadi objek atau sasaran sebagai sumber data adalah Pengelola, Pendidik serta Peserta didik di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Informatika Sarana Cipta Sidoarjo. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen dari identitas peserta didik yang berada di Lembaga Kursus dan Pelatihan. Adapun proses penelitian yang dilakukan yaitu diawali dengan melakukan analisis kondisi lingkungan terkait sumber daya manusia yang ada di dalam lembaga kursus tersebut. Selanjutnya, mulai melakukan interaksi langsung dengan peserta didik. Selain

berinteraksi secara langsung, peneliti juga memperhatikan bahasa, pemikiran, kegiatan, serta tafsiran mereka. Tentunya hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setelah melakukan analisis kondisi lingkungan dan berinteraksi langsung, peneliti mengumpulkan data - data yang berhubungan dengan penyelenggaraan program kecakapan kerja di LKP Infomatika Sarana Cipta Sidoarjo. Contohnya jumlah peserta didik, peserta didik yang mengikuti Uji Kompetensi dan peserta didik yang sudah bekerja.

Metode dalam mengumpulkan data dari penelitian ini adalah wawancara secara mendalam kepada pengelola, pendidik dan peserta didik, melakukan observasi pada saat pelaksanaan program PKK di LKP ISC dan juga dengan dokumentasi yang dimiliki oleh lembaga terkait program PKK yaitu kurikulum, data peserta didik, data pendidik, data peserta didik yang mengikuti evaluasi dan data peserta didik yang sudah bekerja atau yang belum bekerja. Untuk memperoleh data yang valid, diperlukan adanya analisis data yaitu proses di dalam memperoleh dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, observasi dan dokumen dari lembaga sehingga dapat mudah untuk dipahami. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisa data kualitatif ada tiga alur kegiatan, yang pertama kondensasi data yaitu meringkas dengan sistematis dari data hasil yang diperoleh baik dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi dan saling menguatkan dari data satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar mudah untuk dipahami, selanjutnya display atau penyajian data yaitu kegiatan di dalam mengumpulkan informasi yang disusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Di dalam penyajian data ini dilakukan bentuk uraian singkat, dan bisa dalam bentuk tabel. Dalam bentuk teks yang bersifat naratif digunakan untuk menyajikan hasil wawancara dari informan, sedangkan tabel digunakan untuk memudahkan dalam memahami data hasil penelitian seperti tabel dan bagan akan melengkapi proses analisis sehingga hasil penelitian lebih menarik dan dapat ditarik kesimpulan, kemudian kegiatan selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dan merupakan kegiatan akhir dari kegiatan penelitian dengan menemukan makna data yang telah disajikan.

Menurut Loncoln dan Guba (1985) terdapat empat kriteria utama untuk menjamin keberhasilan hasil penelitian kualitatif yaitu:

1. Kredibilitas

Dengan kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran yang artinya bahwa hasil penelitian harus dapat dipercaya dan diterima oleh orang-orang yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.

2. Dependabilitas

Dependabilitas adalah proses dimana penelitian itu apakah bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa penelitian tersebut bisa dipertanggungjawabkan proses penelitiannya ialah bisa menggunakan audit dependabilitas dengan tujuan untuk mengkaji kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Standar ini digunakan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini bermutu atau tidak, diantaranya bisa dilihat apakah penelitian ini sudah hati-hati atau belum, bahkan apakah membuat kesalahan dalam mengkonsepsualisasikan apa yang diteliti, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan, data yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian.

3. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas hampir sama dengan dependabilitas, melainkan konfirmabilitas adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan atau rekaman data lapangan dan koherensinya dalam interpretasi dan simpulan hasil penelitian yang dilakukan auditor. Dalam memenuhi penelusuran dan pelacakan, perlu disiapkan bahan – bahan yang diperlukan, seperti hasil rekaman, hasil analisis data, dan catatan tentang proses penelitian. Untuk penelitian kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh auditor independen. Untuk melakukan audit konfirmabilitas ini bisa dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan audit dependabilitas, sehingga jika hasil audit tersebut menunjukkan adanya konfirmabilitas, maka hasil penelitian kualitatifnya bisa diterima dan diakui.

4. Transferabilitas

Transferabilitas adalah penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu yang dapat diaplikasikan atau di transfer pada konteks lain. Dalam penelitian ini menggunakan uraian rinci (Moleong, 2005). Dengan uraian rinci ini akan terungkap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan yang telah diperoleh peneliti.

Sehingga dapat dilihat keberhasilan pengelolaan program Bantuan Pemerintah bidang kursus komputer program Aplikasi Perkantoran, namun dari data tersebut menghasilkan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sehingga kesimpulan tersebut perlu di verifikasi dengan cara memikirkan ulang selama penelitian dan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) tahun 2021, yang dimaksud dengan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi kepada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi dibidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Pada tahun 2021 ini, LKP Informatika Sarana Cipta (ISC) dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan program PKK. Adapun Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan di Lembaga Kursus dan Pelatihan Informatika Sarana Cipata, Perumahan Jenggolo Utara C-2 Desa Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Bidang Aplikasi Perkantoran.

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syarat – syarat untuk menjadi calon peserta didik Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bagi Peserta Didik

Tidak semua calon peserta didik dapat mengikuti program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) ini, tetapi ada kriteria yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja tahun 2021 yaitu:

- 1) Diutamakan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah atau lulus sekolah tetapi tidak melanjutkan,
- 2) Warga masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan,
- 3) Lulusan SMA sederajat dan Paket C,
- 4) Usia Antara 18 sampai dengan 25 tahun,
- 5) Calon peserta didik harus memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).
- 6) Bagi calon peserta didik sudah diploma atau sarjana harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala desa atau kelurahan.

Pada kenyataannya bahwa untuk mencari calon peserta didik yang akan ikut program PKK tidaklah mudah dengan kriteria yang disyaratkan, tetapi memang tujuannya adalah sangat baik sekali, yaitu ingin membantu kepada lulusan yang belum bekerja, yang masih menganggur, dan tidak bisa kuliah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Inilah sebenarnya yang ingin mendidik dan yang ingin dididik untuk diberikan bekal keterampilan khususnya di bidang komputer agar memiliki keterampilan dan keahlian, dan dibuktikan dengan memiliki sertifikat kompetensi agar mudah untuk memperoleh pekerjaan baik di dunia usaha maupun dunia industri.

Dari persyaratan yang ada, ternyata di dalam mengusulkan dan mengisi aplikasi bantuan pemerintah, ternyata masih ada persyaratan yang tidak bisa masuk saat diinput di aplikasi yaitu lulusan dari SMA sederajat yang lulus pada tahun itu (2021) dan lulusan dari diploma dan sarjana yang lulus pada tahun 2021, karena dapodiknya masih melekat di sekolah atau di kampusnya sehingga tidak bisa diusulkan sebagai calon peserta didik program PKK. Selain itu, ada calon peserta didik yang tidak bisa juga dimasukkan di aplikasi bantuan pemerintah yaitu apabila seseorang sudah pernah mendaftar di sekolah maupun di perguruan tinggi dan putus sekolah atau putus kuliah, yang posisinya masih belum dikeluarkan di dapodiknya.

2. Implementasi Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bidang Aplikasi Perkantoran

Tidak semua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dapat menyelenggarakan program Bantuan Pemerintah ini, karena program ini benar – benar lembaga kursus dan pelatihan yang mampu untuk

Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Bidang Aplikasi Perkantoran di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Informatika Sarana Cipta Sidoarjo

menyelenggarakan dengan baik dan sesuai dengan harapan dari Pemerintah. Adapun persyaratan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan yang mengajukan PKK ini adalah Memiliki MOU dengan Dunia usaha dan Dunia Industri (DUDI), memiliki kurikulum berbasis industri yang di tanda tangan bersama Antara LKP dan dari DUDI, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, melaksanakan program PKK sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis), melaksanakan evaluasi baik evaluasi Lembaga dan Uji Kompetensi, menempatkan lulusan ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Adapun implementasi Bantuan Pemerintah Program PKK Bidang Aplikasi Perkantoran di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Informatika Sarana Cipta (ISC) Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1) Kurikulum Aplikasi perkantoran

Kurikulum yang digunakan untuk program PKK bidang Aplikasi Perkantoran ini adalah kurikulum yang disusun bersama antara pendidik dari LKP dan DUDI yang berbasis industri, artinya di dalam menyusun kurikulum pada program PKK ini adalah tidak hanya disusun sendiri oleh pendidik dari LKP saja, melainkan harus melibatkan dari DUDI, agar hasil yang diharapkan nantinya peserta didik tidak canggung lagi dan cepat menyesuaikan kerja di DUDI karena di dalam menyusun kurikulum melibatkan dari DUDI.

2) Pembelajaran selama 200 jam pelajaran

Peserta didik mendapatkan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bidang Aplikasi Perkantoran sebesar 80% dan materi Soft Skill yaitu Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3) sebesar 10% dan Pendidikan Karakter sebesar 10%. Dipersyaratkan pada program PKK ini dengan tujuan agar pembelajaran tidak hanya materi Hard Skill yaitu aplikasi perkantoran, yang terdiri dari tiga (3) program yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft Power point, tetapi juga ditambah materi soft skill yaitu K3 dan pendidikan Karakter, dengan tujuan nantinya setelah lulus dan selesai mengikuti program PKK ini selain mendapat materi dan keterampilan aplikasi perkantoran, juga memiliki ilmu untuk persiapan kerja di DUDI dan memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Pada pelaksanaan pembelajaran hard skill dan soft skill kepada peserta didik, dilaksanakan selama dua bulan, masuk seminggu lima kali, Senin sampai dengan Jum'at, satu kali pertemuan @4 jam, yang terbagi menjadi dua gelombang yaitu pagi hari pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 dan sore hari pukul 16.00 sampai dengan pukul 20.00.

3) Instuktur

Persyaratan program PKK bidang aplikasi perkantoran ini adalah memiliki kualifikasi pendidikan formal dengan jurusan Teknik Informatika, pendidik memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun sebagai instruktur komputer, memiliki sertifikat kompetensi di bidang aplikasi perkantoran. Sedangkan instruktur program soft skill, instruktur K3 dan pendidikan karakter berasal DUDI dan memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun, jumlah seluruh instruktur pada program PKK ini sebanyak lima orang instruktur, yang terbagi menjadi tiga orang instruktur handskill dan dua orang instruktur soft skill dan pembelajarannya dilaksanakan secara dua gelombang yaitu pagi hari dan sore hari.

4) Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi dan untuk menentukan kelulusan dan persyaratan untuk sertifikat, maka diadakan evaluasi yang terdiri dari 2 yaitu:

a. Evaluasi lembaga

Yaitu evaluasi yang dilaksanakan di lembaga setelah peserta didik telah selesai mengikuti program PKK selama 200 jam pelajaran, evaluasi lembaga ini dilaksanakan di lembaga dan bersifat lokal karena dilaksanakan di lembaga dan bila peserta didik lulus maka akan mendapatkan sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara program PKK.

b. Uji kompetensi di TUK

Peserta didik selain mengikuti evaluasi lembaga juga harus mengikuti evaluasi atau uji kompetensi yang dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK), Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terdekat, dimana Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Informatika Sarana Cipta (ISC) bekerja sama dengan TUK TIK Polindo Surabaya, Jl. Bung Tomo Kav. 8 sebagai tempat uji kompetensi peserta didik program PKK Bidang Aplikasi Perkantoran dari LKP ISC Sidoarjo.

5) MOU dengan DUDI

Lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang mengajukan program PKK ini harus memiliki kerjasama dengan DUDI, demikian juga LKP Informatika sarana cipta Sidoarjo, juga memiliki kerjasama yang dituangkan dalam bentuk MOU dengan DUDI yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	TAHUN BERLAKU
1	PT. Ganda Sari Makmur	Sidoarjo	2023
2	Bear Service Laptop	Sidoarjo	2023
3	Bella Elektronika	Sidoarjo	2023
4	Keola Cafe	Sidoarjo	2023
5	PT. Eksma 89	Surabaya	2023
6	PT. Alamanda	Sidoarjo	2023
7	The Naff	Sidoarjo	2023
8	CV. Karsa Bersama	Sidoarjo	2023
9	SMK YPM 5	Sidoarjo	2023
10	Hotel Mutiara Baru	Kota Batu	2023
11	PT. Jawa Indah Transport	Surabaya	2023
12	Panorama Hotel	Jember	2023
13	CV. Almukarom	Sidoarjo	2023

Kerjasama LKP ISC Sidoarjo dengan mitra DUDI dengan tujuan untuk membantu peserta didik yang sudah selesai untuk mengikuti pembelajaran program PKK Bidang Aplikasi Perkantoran dan sudah mengikuti evaluasi baik evaluasi lembaga maupun evaluasi uji kompetensi di TUK TIK Polindo Surabaya, bisa bekerja lebih cepat karena sudah ada MOU, dan selama kesepakatan belum terisi oleh pekerja yang ada, dan selain dari MOU yang sudah ada, LKP ISC Sidoarjo juga membantu bagaimana bisa cepat bekerja dan saling aktif untuk berusaha mencari DUDI agar cepat bekerja. Dari Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program PKK dipersyaratkan bisa mendapatkan pekerjaan di DUDI maksimal dalam waktu satu tahun sudah mendapatkan pekerjaan.

3. Dampak Bantuan Pemerintah Program PKK

Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Informatika Sarana Cipta (ISC) Sidoarjo harus bisa memberikan dampak yang positif terkait dengan kursus bidang aplikasi perkantoran. Adapun dampak positif dari program aplikasi perkantoran yaitu:

1. Memberikan keterampilan dan keahlian yang selaras dengan kebutuhan DUDI kepada masyarakat yang belum bekerja atau sedang menganggur agar bisa cepat bekerja.
2. Memastikan peserta didik mendapatkan sertifikat kompetensi untuk bekal bekerja di DUDI.
3. Peserta didik dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Simpulan

Di dalam pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Bidang Aplikasi Perkantoran dilakukan sebaik-baiknya dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, dengan tujuan supaya bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yaitu dapat memberikan keterampilan dan keahlian di bidang kursus computer yaitu bidang aplikasi perkantoran.

Terpenuhinya peserta didik yang mengikuti program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yaitu sebanyak 32 peserta didik dari yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan di dalam petunjuk teknis (juknis), yaitu lulusan SMA sederajat, berusia 18 – 25 tahun, belum bekerja atau yang sedang menganggur, dan peserta didik yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di dalam implementasi bantuan pemerintah program PKK bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada yaitu dengan memiliki kurikulum yang berbasis industri yang disusun bersama dengan DUDI, pembelajaran kepada peserta didik selama 200 jam baik materi hard skill maupun soft skill, memiliki instruktur yang profesional dan memiliki kompetensi, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, melaksanakan evaluasi baik evaluasi lembaga maupun evaluasi uji kompetensi dan memiliki MOU dengan mitra kerja DUDI.

Dari peserta didik yang sudah selesai pembelajaran bidang kursus komputer program Aplikasi Perkantoran, sudah mengikuti evaluasi baik lokal maupun uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi, lebih dari 50 persen sudah bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri, dan yang belum mendapatkan kerja, tetap dalam pantauan pengelola lembaga, diharapkan jangka waktu satu tahun semuanya mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah yang pertama didalam melaksanakan Bantuan Pemerintah Program PKK, Lembaga Kursus dan Pelatihan ISC sebaiknya dapat melakukan pengelolaan secara maksimal supaya manfaatnya terasa bagi masyarakat, selanjutnya tidak mudah untuk mencari peserta didik calon program PKK, oleh karena itu untuk mencari calon peserta didik diperlukan cara yang lebih detail dan meluas dengan salah satu caranya yaitu bisa melalui berbagai media promosi dan media social, dan peserta didik yang mengikuti program PKK bidang aplikasi perkantoran diharapkan untuk mengikuti dengan sungguh – sungguh dan belajar yang giat dan lebih menguasai program bidang kursus aplikasi perkantoran, dengan tujuan supaya nanti ketika mengikuti evaluasi khususnya uji kompetensi di TUK TIK bisa lulus dan mendapatkan nilai yang memuaskan.

Daftar Rujukan

- Afrita, I., Imron, A., & Arifin, I. (2018). *Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Industri Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Vokasional*. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*. <https://doi.org/10.17977/um027v1i32018p313>
- Anwar. (2012). *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*. Bandung: Alfabeta.
- Ariyanti, L., Najib, M., Satria, D., & Alita, D. (2020). Sistem Informasi Akademik Dan Administrasi Dengan Metode *Extreme Programming* Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSDI)*, 1(1), 90–96. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/sisteminformasi>
- Depdiknas (2003) UU Sisdiknas RI Nomor 20 Tahun 2003. Surabaya: Media Centre.
- Fauzi, E. R., & Widiastuti, MPd, N. (2018). Peran Lembaga Kursus Dan Pelatihan Menjahit Dalam Memperkuat Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padalarang, 1(2), 30. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v1i2.494>
- Hamalik, Oemar. 2009. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Herlinda, S., Hidayat, S., & Djumena, I. (2017). Manajemen Pelatihan Hantaran dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Warga Belajar di Lembaga Kursus dan Pelatihan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i1.14758>
- Kamil, Mustofa (2009) *Pendidikan Non Formal Pengembangan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publication, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Los Angeles: SAGE Publication.
- Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mulyadi, D., Mulyani, S., & Rustomo. (2018). Evaluasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan Di Jakarta Timur : *The Evaluation of Skills Based Education Program at the Non Formal Institutions. Prosiding 1st National Conference on Education* L ASSESSMENT AND POLICY (Nceap 2018), Nceap.
- Raco, J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Riyanto, Yatim. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif. Surabaya: Unesa University Press
- Triyana, Firda. (2012). Tips Merintis dan Mengelola Berbagai Lembaga Kursus. Yogyakarta: Laksana
- Undang-Undang SISDIKNAS no. 20 Tahun 2003. (2008). Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara. Winarno
- Wijayanti, K. E. (2017). Implementasi Pendidikan Luar Sekolah (*Outdoor Education*) Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga, 2(1), 48. Kea <https://doi.org/10.17509/jpjo.v2i1.6400>